
Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli)

Nur Qomariyah

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of social intelligence and self-efficacy on the learning achievement of Civics in private vocational high school students in East Jakarta. The research method used is a survey with correlation and regression analysis. Data on social intelligence and self-efficacy variables were obtained through questionnaires, while learning achievement data was obtained through tests. The results showed that (1) There was a significant effect of social intelligence and self-efficacy on student achievement, with an indication of the value of Sig = 0.000 < 0.05 and the value of F value = 69.479; (2) There is a significant effect of social intelligence on student achievement, with an indication of the value of Sig = 0.000 < 0.05 and the value of t value = 4.497; (3) There is a significant effect of self-efficacy on student achievement, with an indication of the value of Sig = 0.000 < 0.05 and the value of t value = 5,500. With these results, it can be concluded that social intelligence and self-efficacy significantly affect the learning achievement of private vocational high school students in East Jakarta.

Key Words: *social intelligence, self-efficacy, learning achievement.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan sosial dan efikasi diri terhadap prestasi belajar PPKn siswa SMK swasta di Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan analisis korelasi dan regresi. Data variabel kecerdasan sosial dan efikasi diri diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data prestasi belajar diperoleh melalui tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan sosial dan efikasi diri terhadap prestasi belajar siswa, dengan indikasi nilai Sig = 0,000 < 0,05 dan nilai $F_{hitung} = 69,479$; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan sosial terhadap prestasi belajar siswa, dengan indikasi nilai Sig = 0,000 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} = 4,497$; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri terhadap prestasi belajar siswa, dengan indikasi nilai Sig = 0,000 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} = 5,500$. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan sosial dan efikasi diri terhadap prestasi belajar siswa sekolah menengah kejuruan swasta di Jakarta Timur.

Kata Kunci: kecerdasan sosial, efikasi diri, prestasi belajar.

Penulis Korespondensi: (1) Nur Qomariyah, (2) Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, (3) Jl. Nangka No.58c Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, (4) Email: nurqomariyahrea@gmail.com

Copyright © 2021. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, bersinggungan dengan politik dan kekuasaan adalah keniscayaan bagi masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya (Budiardjo, 2008, p. 15) politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar masyarakat, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Politik pada dasarnya adalah suatu fenomena yang terkait dengan manusia dan secara kodrati berkembang secara dinamis beriringan dengan aktivitas yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karenanya, inti utama dari politik adalah manusia. Maka bagaimanapun pengamatan dan studi tentang politik tidak boleh meninggalkan faktor manusia. (Puluhuluwa, 2005, pp. 262-263)

Gagasan tentang politik tidak jauh dari konsep kekuasaan, atau kerap dianggap identik. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak definisi. Dalam politik, kekuasaan dibutuhkan untuk mendukung dan menjamin berlangsungnya sebuah keputusan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Hal ini merupakan konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, 2003).

Demikian jika berbicara tentang kekuasaan, maka tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Melanjutkan pikiran tentang kekuasaan dalam perspektif ilmu politik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, menganggap bahwa kekuasaan sebagai pokok bahasan yang esensial dalam ilmu politik. Merujuk pada asumsi bahwa terdapat permasalahan yang lebih penting dari segala persoalan politik yaitu negara. Kedua, terdapat argumentasi bahwa kekuasaan adalah suatu pokok bahasan paling esensial, substansial, bahkan menjadi hakikat ilmu politik. Dalam bagian kedua, negara dianggap hanya lembaga bagi berlangsungnya kekuasaan (Zainudin, 1992, pp. 1-3)

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali pemikiran Niccolo Machiavelli tentang politik dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan adalah sebuah abstraksi pengetahuan yang dibatasi oleh 'yang etis dan estetis'. Pemikiran Machiavelli menunjukkan bahwa ia telah keluar dari batasan 'yang etis' pada masa itu dan lebih menumbuhkan 'yang estetis'. Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana implementasi praktis atas pemikiran Machiavelli di Eropa.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar dan memiliki langkah-langkah unik dalam proses analisisnya (Cresswel, 2017:245). Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk proses analisis. Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, mulai dari November 2021 hingga Juni 2022.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah menggunakan empat langkah yakni; 1) Heuristik, 2) Verifikasi, 3) Interpretasi, dan 4) Historiografi (Sulasman, 2014). Proses heuristik adalah proses mengumpulkan data-data yang relevan untuk penelitian. Proses verifikasi, bisa juga disebut proses kritik sumber, merupakan proses menyaring data yang dikumpulkan oleh peneliti sehingga data tersebut menjadi data baku. Proses interpretasi adalah proses penafsiran peneliti atas fakta sejarah yang ditemukan dan diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti. Proses historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta penelitian yang telah ditemukan.

HASIL

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Nicollo Machiavelli, meskipun dianggap sebagai politikus tak bermoral, menelurkan sebuah gagasan kekuasaan yang retrospektif yang bisa digunakan untuk menanggulangi permasalahan negara di zamannya. Tak hanya itu, pemikiran tersebut masih relevan hingga hari ini. Machiavelli sebenarnya bukan memisahkan moralitas dalam politik, akan tetapi Machiavelli membangun sebuah kesadaran moralitas baru dalam konsep kekuasaan. Kesadaran moralitas lama, yang diprakarsai oleh nilai moral gereja, dianggap tidaklah cocok untuk digunakan oleh seorang penguasa kepada rakyatnya. Moralitas gereja sangat lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membangun pengaruh penguasa atas rakyatnya. Moralitas semacam itu bukanlah moralitas yang baik karena moralitas dalam politik

adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

Bagi Machiavelli, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kemanusiaan dan sifat kehewanan pada saat yang sama. Sifat kemanusiaan disimbolkan pada bagaimana kasih sayang dan perilaku saling menolong akibat imbas dari saling membutuhkannya manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, sifat kemanusiaan juga harus diimbangi dengan sifat kehewanan yang memiliki kecenderungan kebuasan terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan haruslah mampu mempertahankan kekuasaannya. Kemampuan itu akan dimiliki apabila pemimpin memiliki kebuasan dalam dirinya sehingga ia dapat mengontrol potensi penyakit-penyakit yang berasal dari luar kekuasaan menggerogoti kekuasaan yang ia miliki. Moralitas gereja terbukti tak mampu menjawab pertanyaan kenapa di Italia terjadi krisis legitimasi kekuasaan. Bagi Machiavelli, moralitas adalah suatu hal yang bisa digunakan untuk keperluan praktis dan diimplementasikan langsung untuk memenuhi kebutuhan solusi atas permasalahan yang ada.

Meski kebuasan dianggap keluar dari aspek moralitas pada masa itu, Machiavelli telah sanggup menunjukkan bahwa kebuasan adalah sebuah moralitas tersendiri dalam politik. Asumsi ini dibangun karena Machiavelli beranggapan bahwa pemimpin yang bermoral adalah pemimpin yang bisa mempertahankan kekuasaannya, sekaligus melindungi rakyat melalui kekuasaan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki sifat kebuasan, ia akan dengan mudah disingkirkan oleh lawan politiknya yang biasanya bersifat licik. Sebab seorang pemimpin mudah untuk disingkirkan, maka, bagi Machiavelli, pemimpin tersebut tak memiliki moralitas sebagai pemimpin. Seorang pemimpin adalah penguasa yang memiliki kekuasaan dan mampu mempertahankan kekuasaan tersebut. Moralitas ini di kemudian hari digunakan oleh tokoh-tokoh Eropa untuk melaksanakan agenda-agenda politiknya.

DISKUSI

Setting sosial

Italia sekitar tahun 1500 M mengalami periode perebutan kekuasaan yang penting untuk diingat sejarah. Pada 1494 dan 1499, Charles VII, raja Prancis, menyerang Napoli dan akhirnya seluruh semenanjung Italia. Pada tahun 1500 Louis XII, raja baru Prancis, dan Ferdinand Aragon, raja Spanyol, menyerbu Lombardy dan menghidupkan kembali seluruh Italia. Para pemimpin dan orang-orang dari negara-kota Italia tidak dapat memahami bencana itu. Pada saat itu puncak dari gerakan Renaisans (Renaissance) yang berkobar di Italia sejak tahun 1300-an (Machiavelli N. , Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi), 1996:99) Pada periode ini Italia dihadapkan kepada permasalahan lemahnya kepemimpinan penguasa yang sedang memimpin saat itu. Krisis legitimasi sedang menjalari pemimpin-pemimpin di Italia sehingga telah menjadi penyakit tersendiri. Pada masa ini, Italia masih memegang erat moralitas gereja dalam menjalankan kepemimpinan sehingga gereja memiliki porsi yang banyak dalam proses kebijakan dan penguasaan sumber-sumberdaya. Tingginya pengaruh gereja dianggap sebagai sebuah permasalahan tersendiri karena nyatanya gereja tak mampu memberi solusi atas permasalahan krisis legitimasi yang dialami oleh pemimpin-pemimpin Italia di masa itu. Untuk itu, Machiavelli mencoba memberi pandangan baru terkait moralitas politik. Machavelli berpandangan bahwa kekerasan dan penipuan adalah hal yang wajar dalam politik. Lebih lanjut, Machiavelli menyimpulkan bahwa kekerasan dan penipuan selalu digunakan dalam praktik politik di negara-negara lain dan menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut harus digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. (Rapar, 1991:67)

Latar Belakang pemikiran

Krisis legitimasi di Italia dialami karena rakyat jelata kota Florence tidak mendapat perhatian khusus dari keluarga Guelphi sebagai penguasa yang berkuasa pada masa itu. Lama kelamaan

timbul keresahan sosial di kalangan rakyat kecil itu. (Mayer, 1951:86) Pada masa pemerintahan Lorenzo Agung (1464-1492), Niccolo Machiavelli lahir (1469-1527) dan dibesarkan dalam keluarga ayahnya yang ahli hukum dan kaya. Ayahnya membantu Machiavelli untuk menikmati pendidikan yang terbaik pada waktu itu di Florence. Ayahnya sebagai ahli hukum bekerja sebagai pegawai pemerintah pada kantor pajak. Ayahnya menginginkan kelak Machiavelli menjadi seorang teknokrat, sedang ibunya merindukan anaknya menjadi imam atau rohaniwan. Tetapi Machiavelli sendiri kemudian berkembang menjadi seorang politikus dengan ide-ide yang kongkret, praktis dan peka terhadap prioritas-prioritas tindakan. Tidak banyak yang bisa dicatat apa yang dialami dan dilakukan Machiavelli selama dia belum tampil dalam kehidupan publik pada tahun 1498.

Lalu pada tahun 1512 ketika keluarga Medici berkuasa, karir politik Machiavelli hancur. Ia ditangkap atas tuduhan ikut serta dalam konspirasi pemberontakan terhadap keluarga Medici. Ia kemudian dipenjarakan selama setahun. Setelah ia bebas, ia diasingkan di pinggiran kota Florence di sebuah rumah kecil dengan kebun kecilnya. Di tempat inilah ia melakukan perenungan dan refleksi atas segala pengalaman politiknya. Pada masa-masa ini pula ia menulis beberapa buku mengenai politik dan kekuasaan. Namun yang paling fenomenal dari buku-bukunya adalah *Il Principe* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *The Prince*. Buku inilah yang berisi mengenai nasihat-nasihat Machiavelli kepada penguasa Florence ketika itu yaitu Lorenzo De Medici. Maksud penulisan buku ini adalah ingin mengambil hati penguasa tersebut agar mengangkatnya kembali menjadi pejabat negara dalam kerajaan Florence. Namun ternyata usahanya itu gagal dan ia tetap dalam pengasingannya hingga mati pada tanggal 22 Juni tahun 1527. (Hardiman, 2004:190)

Perkembangan sejarah telah mengajarkan Machiavelli sebuah nilai dalam unsur kekuasaan politik untuk dipegang. Pada masa itu, keutamaan dalam politik adalah bagaimana seorang pemimpin mampu untuk menciptakan suasana yang indah untuk mencapai kekayaan dan dan kehidupan yang layak. Suasana yang indah hanya dapat dibangun apabila terdapat kebaikan dan rasa memiliki antar sesama manusia dalam sebuah kelompok masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan krisis legitimasi, Machiavelli menyarankan untuk tidak selalu berpedoman pada keutamaan, namun lebih baik berlindung dengan keburukan bila memang itu sesuai dengan tujuannya. (Machiavelli N. , 2008:76)

“....And again, he need not make himself uneasy at incurring a reproach for those vices without which the state can only be saved with difficulty, for if everything is considered carefully, it will be found that something which looks like virtue, if followed, would be his ruin; whilst something else, which looks like vice, yet followed brings him security and prosperity.”

Tujuan dari sebuah kekuasaan adalah untuk membangun peradaban yang baik. Negara adalah sebuah lembaga yang digunakan sebagai instrumen membangun peradaban tersebut. Machiavelli memiliki pandangan yang selaras dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, Negara dipandang sebagai sebuah kesatuan dengan tujuan mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. (H. Juniarso Ridwan, 2010:9) Machiavelli mengembangkan pemikirannya lagi bahwa negara itu ada demi kepentingan negara itu sendiri. Dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, sekalipun dengan caranya yang licik, dengan demikian kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan segala perbuatan manus. Memelihara nilai-nilai yang terutama perlu ditanamkan dalam menjalankan tugas Negara dengan baik adalah : kesediaan untuk kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi; kegairahan untuk berjuang melawan penyelewengan dan tirani; serta ambisi untuk meraih cita-cita yang paling mulia, yakni kehormatan dan kemuliaan Negara disamping kemuliaan diri sendiri. (Skinner, 1992:99) Mengenai kerelaan rakyat, Machiavelli mengatakan agar pemimpin (pangeran) untuk tidak selalu berpedoman pada hal tersebut, karena kerelaan dan keinginan mereka selalu berubah-

ubah, maka dari itu agar selalu berpedoman pada kekuatannya, karena bila ia konsisten pada kekuatannya, maka kekuasaannya akan bertahan. (Machiavelli N. , 2008:124)

Konsep Kekuasaan Machiavelli

Menurut Machiavelli, tujuan dibentuknya negara adalah murni untuk kekuasaan. Kekuasaan berarti kebebasan manusia untuk bertindak sesuai kemauan naluriah manusia itu sendiri. Kebebasan adalah unsur yang membentuk pola perilaku defensi warganya untuk tetap mendapatkan kebebasan yang telah mereka miliki dan mempertahankan kebebasan tersebut. Oleh karenanya melalui kekuasaan, seseorang bisa menjaga sebuah kota dan yang terbiasa pada kebebasan akan mempertahankannya dengan lebih mudah dengan cara-cara yang dilakukan warganya sendiri ketimbang cara-cara lainnya. (Machiavelli N. , Sang Pangeran, 2014:13) Biarkan dia bertindak seperti pemanah yang kelihatannya sangat jauh jaraknya, dan mengetahui batas-batas kekuatan yang bisa dicapai anak panahnya, membidik jauh diatas sasaran bidikannya, bukan berusaha mencapainya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan anak panahnya diarah yang begitu tinggi, tetapi berusaha untuk bisa dengan bantuan sasaran bidik yang cukup tinggi itu untuk membidik sasaran yang ingin dicapainya. (Machiavelli N. , Sang Pangeran, 2014:35)

Machiavelli menyimpulkan bahwa kekuatan dan muslihat selalu digunakan dalam praktik politik di negara-negara yang telah ia kunjungi, sehingga ia berkesimpulan bahwa dua hal itulah yang harus digunakan dalam mempertahankan kekuasaan. (Rapar J. , 2001:88) Kekuasaan menurut Machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Dalam pemikiran Machiavelli kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan. (Rapar J. , 2001:18) Dia usul, meski begitu untuk merebut sesuatu negara, si penakluk mesti mengatur langkah kekejaman sekaligus sehingga tidak perlu mereka alami tiap hari kelonggaran harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa merasa senang. (Richie, 2018:9) Bagi Machiavelli, Negara hanya lembaga bagi kekuasaan. (Zainudin, 1992:63)

Implementasi Pemikiran Machiavelli di Eropa

1. Adolf Hitler

Hitler adalah seorang tokoh politik, pemimpin yang dikenal sebagai seorang fasis sejati. Pada tahun 1919, ketika usianya 30 tahun Hitler bergabung dengan partai buruh Jerman, visi politiknya begitu jelas yaitu menjadikan bangsa Arya menjadi bangsa yang tinggi yang tidak diinjak-injak oleh bangsa manapun, bahkan bangsa Arya harus menjadi bangsa penguasa dunia. (Pambudi, 2022:80). Pemikiran tersebut tak jauh dari apa yang diajarkan Machiavelli. Hitler memiliki anggapan bahwa bangsa yang mencintai dirinya akan mampu memiliki visi untuk berkuasa dan mampu mempertahankan kekuasaannya. Tak lain, Hitler bertarung untuk mewujudkan kejayaan Jerman melalui pikiran fasisnya melalui pengkambing-hitaman umat yahudi dan berupaya memberantas mereka. Hitler kemudia mewujudkan hal tersebut melalui jalur politik dengan membentuk Partai NSDAP. Singkatnya, Pada tahun 1929 NSDAP menjadi pemenang mayoritas dalam pemilihan umum di kota Coburg, dan kemudian memenangi pemilu daerah Thringen. (Hitler, 2010)

Ketika memegang kekuasaan, Hitler masih mengamalkan taktik kekerasan tetapi pada masa yang sama Hitler menjalin hubungan erat dengan pihak konservatif yang ingin menggunakannya sebagai alat menentang ancaman komunis. (Ebenstein, 2006:71) Hitler juga menyalahkan Komunis dan Yahudi atas kelembapan ekonomi dan berjaya meraih dukungan angkatan tentara dengan anggota polisi bekerja sama dalam melengkapi peralatan senjata Jerman. (Hitler, 2010:44). Pada titik ini, Hitler menganggap bahwa kelemahan Jerman, paska kekalahan mereka dalam perang dunia pertama adalah disebabkan oleh dominasi kaum lain.

Dari sini, Hitler mulai memisahkan bentuk-bentuk politik dan moralitas. Hitler berjuang untuk meraih kembali kejayaan kaum Arya dan menguasai dunia.

2. Benito Mussolini

Sama seperti Hitler, Mussolini adalah seorang fasis. Dia memiliki keyakinan bahwa hanya satu otak manusia, satu kemauan, yang dapat memimpin sebagian besar rakyat Italia. Dia mencekoki pemikiran sebagian besar rakyat dan mampu menyisipkan nilai-nilai yang ia ilhami sehingga ia berkuasa. Kekuasaan yang dibangun oleh Mussolini berbasis pada kesetiaan dan loyalitas warga negara untuk kebangkitan dan kejayaan negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pada masa rezim fasisme, Benito Mussolini berkuasa mutlak atas segala kebijakan politik Italia (Skripsi Rini Aryani (2010). Keyakinan politik Mussolini yang menghantarkannya ke puncak kekuasaan sebagai diktator Italia dengan mengusung ide Fasisme berangkat dari penggalan sejarah Italia ketika terombang-ambing diantara ide sosialisme dan liberalisme dalam usaha memecahkan persoalan-persoalan mendesak di bidang ekonomi dan politik. (Wendoris, 2009:9) Mussolini sangat yakin bahwa jalan keluar dari kebuntuan di berbagai bidang yang berhubungan dengan masyarakat Italia sampai saat itu hanya bisa dipecahkan oleh seorang tokoh diktator yang memiliki karisma sangat kuat. Tokoh ini harus didukung oleh sebuah organisasi yang kuat pula. Sebuah partai tunggal yang ultranasionalis dan memiliki sistem mobilisasi massa paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, tidak dapat ditawar-tawar lagi, pemimpin yang bersangkutan harus mempunyai akses tidak terbatas dalam memanfaatkan kemajuan industri dan teknologi untuk melakukan propaganda. (Wendoris, 2009:8)

Selama memerintah, Mussolini menerapkan diktatorisme dan sistem sensor yang sangat ketat. Kediktatoran tersebut menyebabkan ia meraih kekuasaan mutlak sehingga tak ada yang berani untuk melawannya. Adapun yang mencoba melawan, ia singkirkan melalui jalur-jalur kekerasan. Gebrakan pertamanya setelah memegang kekuasaan adalah menyerang Ethiopia dengan merujuk pada pandangan rasis Charles Robert Darwin, "Ethiopia bangsa kelas rendah, karena termasuk kulit hitam. Jika diperintah oleh ras unggul seperti Italia, itu sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi,". Ia mendalami Machiavelli bahwa dominasi pemikiran dan doktrinasi yang selaras dengan ancaman persuasif akan menundukkan lawan-lawan politiknya. Bahkan Mussolini bersikeras bahwa bangsa-bangsa berevolusi melalui peperangan. Sehingga jadilah Italia waktu itu bangsa yang ditakuti sepek terjangnya. Mussolini juga membentuk aliansi militer dengan Nazi Jerman pada tahun 1939 dan tak lama kemudian meletuslah Perang Dunia Kedua.

SIMPULAN

Politik sebagai sebuah sistem dalam kehidupan manusia mempunyai porsi yang cukup penting. Hingga bisa dikatakan, tidak ada satu komunitas manusia dimana pun yang terlepas dari politik. Hal ini karena politik muncul secara alami atas dasar kebutuhan manusia mengenai pengaturan hidupnya dan menghindari konflik antar sesama manusia dalam menuju kesejahteraan bersama. Sistem dan konsep politik tersebut terpusat dalam masalah kekuasaan. Bila politik merupakan unsur alami dalam lingkup komunitas manusia yang disebut masyarakat, maka nilai-nilai masyarakat akan sangat berpengaruh dalam politik juga. Maka kekuasaan juga harus dibangun di atas nilai-nilai dan norma-norma tersebut.

Situasi politik dan keadaan negara pada masa itu telah mengubah pola pikir Machiavelli. Hal ini dapat kita lihat dalam gagasan atau pemikirannya tentang negara dan pemimpin atau penguasa. Gagasan atau pemikiran Machiavelli yang tajam dan sangat kontroversial mendapat tanggapan yang berbeda dari orang lain. Ada yang memuji atas gagasan-gagasannya, namun ada juga yang mengutuk atau mencela. Sebab sungguh terasa berbeda dengan apa yang menjadi pandangan publik pada zaman itu.

Italia menghadapi tantangan besar karena tidak berdaya terhadap kekuasaan negara asing misalnya Jerman, Perancis dan Spanyol. Machiavelli hidup dalam perubahan kekuasaan secara cepat, kurang stabil dan mengalami krisis legitimasi. Maka ia mengajukan suatu pola pemikiran yang baru untuk mendobrak tatanan politik dan legitimasi kekuasaan. Ia menginginkan suatu negara yang sehat dan kuat, negara yang memiliki sistem militer yang tangguh. Maka setiap warga negara harus wajib militer demi mempertahankan keutuhan negara.

Kekuasaan menurut Machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Dalam pemikiran Machiavelli kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan.

Machiavelli telah mengargumentasikan gagasannya dalam sebuah karya yang memang memiliki peranan penting dalam dunia politik. Karena dengan karyanya itu, telah membebaskan politik dari cengkraman Gereja. Akan tetapi disisi lain Machiavelli dengan segala metode yang diajarkannya terhadap perilaku seorang penguasa telah menjustifikasi semua cara untuk mempertahankan kekuasaan dan negaranya. Sehingga apabila ditarik dalam arti “etika humanisme” menghalalkan segala cara dalam tindakan seorang penguasa maka tetap saja itu bisa dikatakan tidak beretika.

Adapun implementasi ajaran Machiavelli dapat ditilik melalui indikator-indikator kekuasaan yang digagas olehnya. Eropa pada masa Perang Dunia II telah memberikan gambaran tentang sistem diktator seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Melalui sistem pemerintahan pada masa kedua tokoh tersebut, gagasan Machiavelli dianggap mampu merepresentasikan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dengan tegas menggunakan kekuatan yang dimiliki penguasa.

REFERENSI

- A.A., A. H. (2010). *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Health Books.
- Abdullah, M. A. (2003). *Menyatukan Kembali Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Aprianto, H. (2013). *Niccolo Machiavelli Il Principe (Sang Pangeran)*. Yogyakarta: Palapa.
- Archer, J. (2004). *Kisah Para Diktator (Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran)*. Yogyakarta: NARASI.
- Bero, V. (2007). *Musolini diantara Bayang-Bayang Hitler dan Romantika Clara Petacci*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burn, E. M. (1954). *Western Civilization: Their History and Their Culture*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Butler, R. (2008). *Hitler Young Tigers (Sepak Terjang NAZI Pemuda Hitler dalam Perang Dunia II)*. Jakarta: Planet Buku.
- Carlisle Ford Runge, L. G. (2020). Viewpoint: Hunger as a weapon of war: Hitler's Hunger Plan, Native American resettlement and starvation in Yemen. *ELSEVIER*, 6.
- DEPDIKBUD. (1996). *Suatu hal atau keadaan yang menunjukkan tidak adanya suatu pemerintahan Undang-Undang, peraturan atau ketertiban yang memunculkan kekacauan-kekacauan dalam sebuah negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaya, T. H. (2004). *Humanisme dan Skolatisme: Sebuah Debat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ebenstein, W. (2006). *Isme-isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*. Yogyakarta: Penerbit NARASI.
- Gaus, G. F. (2013). *Handbook Teori Politik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.
- H. Juniarso Ridwan, A. S. (2010). *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum (Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad ke-20)*. Bandung: Nuansa.

- Hadiwijono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Jakarta: Kanisius.
- Haikal, H. (1989). *Renaissance dan Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2002). *Politics and Edition*. New York: Palgrave MacMillan.
- Hitler, A. (2010). *Mein Kamp: Edisi Lengkap Volume I dan II*. Jakarta: PT. Suka Buku.
- Hujibers, T. (1995). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Cetakan VIII)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hujibers, T. (1996). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Ikhwan, M. (2016). Machiavelli: Pembenaran Kekerasan Dalam Politik Kekuasaan. *AL-IJTIMA' International Journal of Government and Social Science*, 102.
- J, H. S. (2002). *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju.
- Kenny, A. (2006). *A New History of Western Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Klingemann, R. E.-D. (1996). *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press.
- M. Sastrapratedja, F. M. (1991). *Sang Penguasa Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Machiavelli, N. (1991). *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik (cetakan ketiga). Terjemahan oleh C. Woekirsari, Kata Pengantar M. Sastrapratedja, dan Frans M. Parera*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Machiavelli, N. (1996). *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Machiavelli, N. (2008). *The Prince*. Selasa: Selasa Publishing.
- Machiavelli, N. (2014). *Sang Pangeran*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maharani, S. (2010). *Hitler Tidak Mati Dibunuh*. Jakarta: Buku Kita.
- Mayer, F. (1951). *A History of Modern Philosophy*. USA: American Book Company.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Yogyakarta: Mizan.
- Noer, D. (1998). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Noerhadi, T. H. (2013). *Aku Dalam Budaya: Telaah Metodologi Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pambudi, A. (2022). *Kematian Adolf Hitler*. Yogyakarta: NARASI.
- Priyadi, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Puspitasari, S. H. (2001). Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *JURNAL HUKUM. NO. 18 VOL. 8*, 30-45.
- Rapar. (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rapar, J. (2001). *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Richie, F. D. (2018). Pemikiran Machiavelli tentang Politik dan Kekuasaan. *Academia*.
- Russell, B. (2004). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sills, D. L. (1968). *International Encyclopedia of Social Sciences*. London: The Macmillan Company & The Free Press.
- Skinner, Q. (1992). *Machiavelli; Dilema Kekuasaan dan Moralitas*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Smith, A. (2002). *Nasionalisme: teori-ideologi-sejarah Terjemahan oleh Franz Kowa*. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhelmi, A. (2007). *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sularto, S. (2003). *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sulasman, H. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafiie, I. K. (2012). *Filsafat Politik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Syam, F. (2010). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syam, F. U. (2007). *Pemikiran Politik Barat Sejarah Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syamdani. (2009). *Kisah Diktator Psikopat: Kontroversi Kehidupan Pribadi dan Kebengisan Para Diktator*. Yogyakarta: NARASI.
- Syamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Takwir, B. (2012). *Akar-Akar Ideologi Cover*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Wendoris, T. (2009). *Bennito Mussolini*. Yogyakarta: Milestore.
- Wiyono. (1994). *Mengukur Kompetensi Lulusan Lembaga Pendidikan Guru*. Jakarta: LPTK.
- Ya'cub, H. (1984). *Filsafat Ketuhanan*. Bandung: Al-Maarif.
- Zainudin, A. R. (1992). *Kekuasaan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zubaidi, A. B. (2004). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.